

Public Participation and Regulatory Legitimacy in Indonesia's Strategic National Projects: Between Developmentalism and Constitutional Rights

Rengga Kusuma Putra^{*1}, Joni Laksito², Adi Suryo Ramadhan³
^{1,2,3}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia
E-mail: rengga@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Strategic national projects, Developmentalist governance, Public participation, Regulatory legitimacy, agrarian conflict, Socio-legal studies.	<i>This study examines the relationship between public participation and regulatory legitimacy in the implementation of Strategic National Projects (PSN) in Indonesia amid tensions between developmentalism and constitutional rights protection. The acceleration of infrastructure development through PSN has strengthened centralized governance while simultaneously generating agrarian conflicts, social resistance, and criticism regarding the quality of public participation in development governance. This research employs an empirical socio-legal approach using qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, regulatory analysis, and documentation related to PSN implementation. The findings reveal that PSN governance is dominated by executive-driven governance in which public participation tends to operate procedurally rather than substantively. Limited transparency and weak recognition of communal rights reinforce asymmetrical governance relations between the state, investors, and local communities. These conditions contribute to increasing agrarian conflicts, declining public trust, and weakening social legitimacy within strategic development governance. This study concludes that formal legal legitimacy does not automatically produce social legitimacy when development processes remain centralized, exclusionary, and lacking meaningful public deliberation. The study contributes to socio-legal governance scholarship by demonstrating how developmentalist governance and procedural participation shape legitimacy crises within strategic national development. The research highlights the importance of inclusive, transparent, and participatory governance in strengthening constitutional democracy and sustainable development legitimacy in Indonesia.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/klagdz02	
Submitted: April 2026, Reviewed: May 2026, Accepted: June 2026	
Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan infrastruktur dan ekspansi investasi telah menjadi karakter utama tata kelola pembangunan di berbagai negara berkembang. Negara semakin menempatkan proyek strategis berskala besar sebagai instrumen utama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, serta mempercepat modernisasi industri dan konektivitas nasional (Liu & Li, 2024; Hasbullah, 2026). Dalam konteks tersebut, pendekatan *developmentalist governance* berkembang sebagai model pembangunan yang menempatkan efisiensi regulasi, percepatan investasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan sebagai prioritas utama kebijakan publik (Du et al., 2022; Fagbemi et al., 2022). Meskipun pendekatan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara signifikan, pada saat yang sama pendekatan tersebut juga memunculkan berbagai

persoalan sosio-legal terkait partisipasi publik, perlindungan hak konstitusional, konflik agraria, dan legitimasi demokratis dalam governance pembangunan.

Dalam studi *governance* kontemporer, hubungan antara *developmentalism* dan demokrasi konstitusional semakin menjadi perhatian penting, khususnya di negara-negara *Global South* (Berman et al., 2025; Vampa et al., 2025). Pembangunan strategis yang berorientasi pada percepatan investasi sering kali disertai penguatan kekuasaan eksekutif, penyederhanaan regulasi, dan sentralisasi kewenangan administratif (Walecka, 2026). Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang deliberasi publik, melemahkan transparansi *governance*, serta mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, legitimasi pembangunan tidak lagi hanya ditentukan oleh legalitas formal dan keberhasilan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas partisipasi publik, keadilan prosedural, akuntabilitas demokratis, dan penerimaan sosial terhadap kebijakan negara (Khanif & Yunita, 2024).

Indonesia menjadi salah satu contoh penting melalui implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menjadikan PSN sebagai instrumen utama percepatan pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, penguatan investasi, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi (Sofianto et al., 2023; Talitha, 2025). Reformasi regulasi melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi investasi, dan penguatan koordinasi pusat dilakukan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis tersebut. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah kompetisi global (Constanta, 2024; Džankić et al., 2026).

Namun demikian, implementasi PSN juga memunculkan berbagai konflik sosio-legal yang kompleks. Berbagai proyek strategis sering dikaitkan dengan konflik agraria, pengadaan tanah secara paksa, relokasi masyarakat, degradasi lingkungan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal (Hirschl & Hudson, 2024; Maboudi & Nadi, 2022). Dalam banyak kasus, masyarakat terdampak menilai bahwa konsultasi publik hanya dijalankan sebagai formalitas administratif dan bukan sebagai mekanisme partisipasi substantif yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah kebijakan pembangunan. *Governance* pembangunan cenderung dipersepsikan lebih berorientasi pada percepatan investasi dibanding perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak (Lafont, 2025; Zenker et al., 2024).

Persoalan partisipasi publik menjadi sangat penting karena legitimasi dalam negara demokrasi konstitusional tidak hanya ditentukan oleh validitas hukum formal, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan publik (Abesha et al., 2022; Kyriakopoulos et al., 2023). Ketika masyarakat tidak memperoleh ruang partisipasi yang substantif, legitimasi regulasi berpotensi mengalami penurunan meskipun kebijakan pembangunan tetap sah secara administratif. Dalam konteks tersebut, legitimasi regulasi tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga dengan kepercayaan publik, penerimaan sosial, dan persepsi keadilan terhadap

governance pembangunan (Chen & Li, 2024). Kompleksitas *governance* PSN semakin diperkuat oleh transformasi regulasi nasional melalui kebijakan percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi. Reformasi regulasi memang meningkatkan efisiensi pembangunan, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan kekhawatiran mengenai melemahnya pengawasan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi partisipatif, dan meningkatnya dominasi *executive-driven governance* (Ahn & Juraev, 2025; Choudhury, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi dan prinsip *constitutional governance* yang menekankan perlindungan hak warga negara, transparansi, serta akuntabilitas demokratis (García-Llorente & Olmeda, 2026).

Penelitian sebelumnya mengenai Proyek Strategis Nasional sebagian besar berfokus pada efektivitas pembangunan, konflik agraria, tata kelola investasi, atau implementasi kebijakan pembangunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembangunan strategis memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah (Meckelburg & Wardana, 2024; Yu et al., 2024). Sebaliknya, penelitian lain menegaskan bahwa pembangunan strategis juga memperkuat ketimpangan agraria, konflik sosial-ekologis, dan marginalisasi masyarakat lokal (Zhang et al., 2023). Namun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan karena belum secara mendalam menjelaskan hubungan antara partisipasi publik dan legitimasi regulasi dalam kerangka *empirical socio-legal governance* (Kyriakopoulos et al., 2023). Selain itu, sebagian besar studi masih menempatkan partisipasi publik sebagai prosedur administratif, bukan sebagai elemen utama legitimasi demokratis dan perlindungan hak konstitusional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara partisipasi publik dan legitimasi regulasi dalam implementasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia melalui pendekatan *empirical socio-legal research*. Penelitian ini mengkaji bagaimana *governance developmentalism* membentuk mekanisme partisipasi publik, bagaimana legitimasi regulasi dikonstruksi melalui prosedur administratif dan hukum, serta bagaimana masyarakat terdampak memaknai perlindungan hak konstitusional dalam konflik pembangunan strategis nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka *participatory legitimacy* yang menjelaskan hubungan antara *developmentalist governance*, partisipasi publik, perlindungan hak konstitusional, dan legitimasi regulasi dalam tata kelola pembangunan strategis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan efektivitas pembangunan dan aspek ekonomi, penelitian ini menempatkan pengalaman masyarakat terdampak sebagai fokus utama dalam memahami legitimasi *governance* pembangunan nasional. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan sosio-legal empiris dengan perspektif *constitutional governance* untuk menjelaskan bagaimana pembangunan strategis memengaruhi demokrasi partisipatif dan relasi kekuasaan antara negara, investor, dan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian *socio-legal studies*, *participatory governance*, *constitutional democracy*, dan *regulatory legitimacy* di negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi *governance*

pembangunan tidak dapat hanya dibangun melalui legalitas formal dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga harus didasarkan pada partisipasi substantif, transparansi, perlindungan hak konstitusional, dan akuntabilitas demokratis. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan *governance* Proyek Strategis Nasional melalui peningkatan mekanisme partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak agraria dan lingkungan hidup masyarakat terdampak.

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap pembangunan berkelanjutan, demokrasi partisipatif, dan akuntabilitas hak asasi manusia, pemahaman mengenai hubungan antara partisipasi publik dan legitimasi regulasi menjadi semakin penting. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan strategis tidak hanya diukur melalui realisasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara menjaga *governance* pembangunan yang inklusif, konstitusional, dan demokratis. Oleh karena itu, keberlanjutan Proyek Strategis Nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak konstitusional dan tata kelola partisipatif masyarakat.

II. METODOLOGI

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan *empirical socio-legal research* untuk menganalisis hubungan antara partisipasi publik dan legitimasi regulasi dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Pendekatan sosio-legal empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai sistem normatif formal, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan, khususnya dalam kaitannya dengan *developmentalist governance*, perlindungan hak konstitusional, dan demokrasi partisipatif. Dalam penelitian ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang digunakan negara untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kekuasaan dalam *governance* pembangunan strategis nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana struktur *governance* membentuk mekanisme partisipasi publik, bagaimana masyarakat terdampak memandang legitimasi regulasi, serta bagaimana hak-hak konstitusional dinegosiasikan dalam konflik pembangunan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, tata kelola lingkungan, dan ekspansi investasi strategis.

Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *socio-legal studies*, *participatory governance*, *constitutional governance*, dan *regulatory legitimacy*. Perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana *governance* yang berorientasi *developmentalism* memengaruhi partisipasi demokratis, transparansi, keadilan prosedural, dan kepercayaan publik dalam tata kelola pembangunan strategis. Penelitian ini juga menggunakan perspektif *critical governance* yang memandang legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada validitas formal, tetapi juga pada penerimaan sosial yang dibentuk melalui inklusi demokratis, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

B. Research Location and Case Selection

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami konflik sosio-legal terkait implementasi Proyek Strategis Nasional. Pemilihan kasus dilakukan secara *purposive* untuk memastikan bahwa proyek yang dipilih merepresentasikan variasi sektor pembangunan, konflik agraria, persoalan lingkungan, dan dinamika *governance* pembangunan strategis. Kriteria pemilihan kasus meliputi proyek strategis yang melibatkan pengadaan tanah berskala besar, proyek yang menimbulkan konflik sosial atau kontroversi publik, proyek yang berdampak terhadap masyarakat lokal atau masyarakat adat, proyek dengan implikasi lingkungan yang signifikan, serta proyek yang menunjukkan variasi mekanisme partisipasi publik dan struktur *governance*. Kasus penelitian mencakup pembangunan infrastruktur, kawasan industri, proyek energi, dan investasi berbasis sumber daya alam. Pendekatan studi kasus komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik *governance*, mekanisme partisipasi publik, serta pembentukan legitimasi regulasi pada berbagai konteks pembangunan strategis nasional.

Table 1. Research Characteristics

Komponen Penelitian	Deskripsi
Jenis Penelitian	<i>Empirical socio-legal research</i>
Pendekatan	Kualitatif deskriptif-analitis
Fokus Penelitian	Partisipasi publik dan legitimasi regulasi dalam PSN
Unit Analisis	<i>Governance</i> proyek strategis nasional
Lokasi Penelitian	Wilayah konflik PSN di Indonesia
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, observasi, dokumentasi
Teknik Analisis	<i>Thematic socio-legal analysis</i>
Perspektif Teori	<i>Socio-legal theory, constitutional governance, dan participatory legitimacy</i>
Informan Utama	Pemerintah, masyarakat terdampak, NGO, akademisi
Tujuan Penelitian	Menganalisis hubungan partisipasi publik dan legitimasi regulasi

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

C. Research Participants and Data Sources

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak langsung oleh implementasi Proyek Strategis Nasional. Informan penelitian meliputi pejabat pemerintah, pemerintah daerah, regulator lingkungan, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat adat, dan warga terdampak proyek pembangunan strategis. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi kelembagaan, keterlibatan dalam *governance* pembangunan, dan pemahaman terhadap konflik sosio-legal yang terjadi. Penelitian ini melibatkan lebih dari tiga puluh informan utama dari berbagai lokasi penelitian. Wawancara dilakukan hingga mencapai *data saturation*, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan variasi informasi yang signifikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan PSN, regulasi pertanahan dan lingkungan, putusan pengadilan, laporan kementerian dan lembaga negara, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen AMDAL, artikel ilmiah, arsip kebijakan, serta laporan media terkait *governance* pembangunan strategis di Indonesia.

D. Data Collection Techniques

Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data untuk menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi informan mengenai partisipasi publik dan legitimasi regulasi dalam *governance* pembangunan strategis. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman empiris yang mendalam mengenai dinamika *governance*, konflik kelembagaan, keadilan prosedural, transparansi, pengadaan tanah, pengambilan keputusan lingkungan, perlindungan hak konstitusional, serta resistensi masyarakat terhadap pembangunan strategis nasional. Observasi lapangan dilakukan pada beberapa lokasi penelitian untuk memahami dinamika sosial dan spasial di sekitar implementasi proyek strategis nasional. Observasi difokuskan pada pola interaksi antara institusi negara, investor, dan masyarakat terdampak dalam praktik *governance* pembangunan strategis.



Gambar 1. Research Framework. Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis dokumen secara sistematis terhadap regulasi, kebijakan pembangunan, struktur *governance*, transformasi regulasi, kebijakan fasilitasi investasi, tata kelola lingkungan, dan mekanisme partisipasi publik yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional. Analisis dokumen difokuskan pada penyederhanaan regulasi, distribusi kewenangan eksekutif, *governance* partisipatif, dan dimensi konstitusional pembangunan strategis. Untuk memperkuat validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi data melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi lapangan, dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan regulasi hukum.

Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi antara temuan empiris dan narasi institusional terkait *governance* pembangunan strategis nasional.

E. Data Analysis

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *thematic socio-legal analysis*. Seluruh data wawancara, hasil observasi, dan dokumen kebijakan ditranskripsi, dikategorikan, dan dikodekan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola *governance*, dinamika legitimasi, dan bentuk eksklusi partisipatif dalam pembangunan strategis nasional. Tahap awal analisis dilakukan melalui *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data empiris. Selanjutnya dilakukan *axial coding* untuk menghubungkan kategori yang berkaitan dengan partisipasi publik, legitimasi prosedural, sentralisasi *governance*, kontestasi konstitusional, transparansi, konflik agraria, dan resistensi sosial. Penelitian ini secara khusus menganalisis pola *procedural participation*, relasi *governance* yang asimetris, dominasi *executive-driven governance*, keterbatasan deliberasi publik, ketimpangan akses informasi, dan persepsi masyarakat terhadap legitimasi negara. Analisis komparatif antar kasus juga dilakukan untuk mengidentifikasi variasi *governance* dan pengaruhnya terhadap legitimasi sosial dalam pembangunan strategis nasional. Untuk mendukung proses kategorisasi dan pengkodean data secara sistematis, penelitian ini menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti *NVivo*.

F. Research Reflexivity and Positionality

Dalam penelitian sosio-legal empiris, posisi peneliti memiliki pengaruh penting terhadap interaksi lapangan dan interpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini mengakui bahwa peneliti tidak berada dalam posisi sebagai pengamat yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai peneliti kritis yang menganalisis relasi kekuasaan dalam *governance* pembangunan strategis nasional. Refleksivitas dilakukan secara berkelanjutan selama proses wawancara, observasi lapangan, dan interpretasi data untuk meminimalkan bias subjektif serta menjaga transparansi analisis. Pendekatan reflektif ini menjadi penting terutama ketika penelitian melibatkan kelompok rentan yang terdampak konflik agraria, degradasi lingkungan, relokasi sosial, dan ketimpangan *governance* pembangunan. Penelitian ini juga menyadari adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara, investor, dan masyarakat lokal yang dapat memengaruhi produksi narasi serta akses informasi selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, interpretasi penelitian didasarkan pada evidensi empiris dan verifikasi silang antar sumber data.

G. Validity and Trustworthiness

Dalam penelitian sosio-legal kualitatif, validitas dan reliabilitas berkaitan erat dengan kedalaman interpretasi, konsistensi data, dan transparansi analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa strategi untuk memperkuat *trustworthiness* penelitian. Kredibilitas diperkuat melalui keterlibatan langsung dalam konteks penelitian, triangulasi berbagai sumber data, serta verifikasi

silang antara hasil wawancara dan dokumen kelembagaan. *Dependability* dijaga melalui dokumentasi sistematis terhadap prosedur penelitian, proses pengkodean, dan tahapan analisis data. *Confirmability* dilakukan dengan memastikan bahwa interpretasi penelitian didasarkan pada temuan empiris dan bukan asumsi subjektif peneliti. *Transferability* diperkuat melalui penjelasan kontekstual yang rinci mengenai struktur *governance*, dinamika partisipasi, dan konflik sosio-legal dalam implementasi PSN.

H. Research Ethics

Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika penelitian pada seluruh tahapan pengumpulan dan analisis data. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan berpartisipasi secara sukarela melalui mekanisme *informed consent*. Informan juga memiliki hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan partisipan, identitas informan serta informasi sensitif dianonimkan. Seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara kolektif tanpa mengungkap identitas pribadi. Sensitivitas etis menjadi perhatian utama terutama ketika penelitian melibatkan kelompok rentan yang terdampak pembangunan strategis nasional, khususnya dalam kasus konflik agraria, sengketa lingkungan, dan relokasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan non-koersif yang mengutamakan keamanan, hak, dan martabat partisipan selama proses penelitian lapangan berlangsung.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia merefleksikan dominasi *developmentalist governance* yang menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur, ekspansi investasi, dan efisiensi regulasi sebagai prioritas utama pembangunan nasional. *Governance* pembangunan strategis cenderung berlangsung secara terpusat melalui penguatan kewenangan eksekutif dan percepatan administrasi pembangunan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menghasilkan keterbatasan partisipasi publik, ketimpangan akses informasi, meningkatnya konflik agraria, serta melemahnya legitimasi sosial terhadap kebijakan pembangunan strategis.

Temuan pertama menunjukkan bahwa struktur *governance* dalam implementasi PSN bersifat sangat sentralistik dan didominasi oleh institusi eksekutif. Pengambilan keputusan terkait prioritas proyek, pengadaan tanah, mekanisme perizinan, dan koordinasi investasi sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat terdampak umumnya baru dilibatkan setelah keputusan strategis mengenai proyek pembangunan telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *governance* pembangunan strategis masih berlangsung secara *top-down* dan teknokratis sehingga kapasitas deliberatif masyarakat menjadi terbatas.

Salah satu informan masyarakat terdampak menyatakan:

“Konsultasi publik dilakukan ketika lokasi proyek dan rencana pembangunan sebenarnya sudah diputuskan sebelumnya. Masyarakat hanya diundang untuk mendengar penjelasan, bukan untuk menentukan arah keputusan.”

Informan lain juga menjelaskan:

“Dalam beberapa forum konsultasi, masyarakat hanya diberikan waktu yang sangat terbatas untuk memberikan tanggapan, sementara keputusan strategis mengenai proyek sudah ditentukan sebelumnya.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam implementasi PSN lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme administratif dibanding ruang deliberasi substantif yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah kebijakan pembangunan.

Tabel 2. Governance Characteristics in Strategic National Projects

Dimensi Governance	Temuan Empiris	Dampak Sosio-Legal
Struktur Governance	Dominasi pemerintah pusat	Melemahnya kapasitas deliberatif lokal
Pengambilan Keputusan	Bersifat <i>top-down</i> dan teknokratis	Partisipasi masyarakat terbatas
Governance Regulasi	Percepatan izin dan investasi	Penguatan <i>executive-driven governance</i>
Partisipasi Publik	Bersifat administratif dan prosedural	Deliberasi substantif melemah
Posisi Komunitas Lokal	Keterlibatan terbatas	Meningkatnya eksklusivitas sosial

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi publik dalam implementasi PSN cenderung bersifat *procedural participation* dibanding *substantive participation*. Forum konsultasi publik lebih banyak difungsikan sebagai sarana sosialisasi proyek dibanding mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam berbagai kasus, masyarakat terdampak tidak memiliki ruang yang memadai untuk memengaruhi pembahasan kompensasi, dampak lingkungan, maupun perubahan desain proyek. Selain itu, penelitian menemukan adanya ketimpangan distribusi informasi antara negara, investor, dan masyarakat lokal. Akses terhadap dokumen AMDAL, mekanisme pengadaan tanah, skema kompensasi, dan dampak sosial proyek sering kali sulit diperoleh masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami. Sebagian besar informasi terkait proyek strategis lebih banyak dikendalikan oleh institusi pemerintah dan aktor investasi.

Salah satu informan menyatakan:

“Banyak masyarakat tidak memahami dampak lingkungan proyek karena dokumen yang tersedia sulit diakses dan menggunakan bahasa teknis yang tidak mudah dipahami.”

Informan lain menjelaskan:

“Akses terhadap dokumen lingkungan sering kali hanya tersedia melalui prosedur administratif yang rumit sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi secara efektif.”

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan transparansi berdampak langsung terhadap kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam *governance* pembangunan strategis. Ketimpangan informasi memperkuat relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara, investor, dan masyarakat terdampak.

Tabel 3. *Dynamics of Participation and Governance Transparency*

Aspek Governance	Kondisi Lapangan	Konsekuensi Empiris
Transparansi Informasi	Dokumen sulit diakses	Ketimpangan informasi meningkat
Forum Konsultasi	Bersifat formalistik	Deliberasi publik terbatas
Distribusi Pengetahuan	Didominasi negara dan investor	Ketergantungan informasi meningkat
Kapasitas Negosiasi	Posisi masyarakat lemah	<i>Governance</i> asimetris
Keterbukaan Regulasi	Rendah	Menurunnya kepercayaan publik

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Konflik agraria menjadi salah satu temuan paling dominan dalam penelitian ini. Konflik meliputi sengketa pengadaan tanah, relokasi masyarakat, perubahan fungsi ruang hidup, serta lemahnya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang tanah bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, sejarah komunitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Seorang perwakilan masyarakat adat menyatakan:

“Bagi masyarakat lokal, tanah bukan hanya soal ekonomi. Tanah adalah bagian dari sejarah, identitas, dan keberlangsungan hidup komunitas.”

Informan lain menjelaskan:

“Sebagian masyarakat memandang mekanisme kompensasi hanya berorientasi finansial dan tidak mampu menggantikan nilai sosial serta budaya yang melekat pada tanah masyarakat.”

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan legal-formal negara terhadap tanah dan pemahaman sosial-kultural masyarakat lokal mengenai ruang hidup mereka. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor utama munculnya resistensi terhadap pembangunan strategis nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi sosial cenderung meningkat pada wilayah yang memiliki tingkat transparansi rendah dan partisipasi publik yang terbatas. Bentuk resistensi muncul melalui demonstrasi publik, gugatan hukum, mobilisasi organisasi masyarakat sipil, dan penolakan terhadap proses pengadaan tanah. Sebaliknya, proyek pembangunan yang menyediakan ruang konsultasi lebih terbuka menunjukkan tingkat penerimaan sosial yang relatif lebih baik.

Salah satu informan menyatakan:

“Masyarakat lebih mudah menerima pembangunan ketika informasi dibuka secara transparan dan masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses diskusi.”

Penelitian ini selanjutnya menemukan adanya kesenjangan antara *legal legitimacy* dan *social legitimacy* dalam implementasi PSN. Meskipun proyek strategis memiliki legitimasi formal melalui

regulasi negara, masyarakat terdampak tidak selalu memandang pembangunan sebagai proses yang adil, transparan, dan demokratis. *Governance* pembangunan yang bersifat sentralistik dan eksklusif cenderung menghasilkan resistensi sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tabel 4. *Agrarian Conflict and Governance Legitimacy*

Dimensi Konflik	Temuan Lapangan	Dampak terhadap <i>Governance</i>
Pengadaan Tanah	Sengketa kepemilikan meningkat	Ketegangan sosial meningkat
Relokasi Masyarakat	Penolakan terhadap pemindahan wilayah	Menurunnya legitimasi sosial
Hak Komunal	Pengakuan tanah adat lemah	Kontestasi konstitusional
Dampak Ekologis	Kekhawatiran kerusakan lingkungan	Kritik terhadap <i>governance</i> pembangunan
Resistensi Masyarakat	Demonstrasi dan gugatan hukum	Krisis legitimasi regulasi

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia merefleksikan konsolidasi *developmentalist governance* kontemporer yang menempatkan pembangunan infrastruktur dan percepatan investasi sebagai instrumen utama pembangunan nasional. Dalam konteks ini, hukum dan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan negara dalam *governance* pembangunan strategis (Haruna et al., 2025). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *governance* pembangunan strategis di Indonesia cenderung berlangsung melalui dominasi *executive-driven governance* yang memperkuat sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat. Meskipun pendekatan tersebut meningkatkan efisiensi administratif dan percepatan investasi, kondisi tersebut secara simultan mempersempit ruang deliberasi publik dan melemahkan partisipasi demokratis masyarakat terdampak. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara orientasi *developmentalism* dan prinsip *constitutional governance* yang menekankan akuntabilitas demokratis, transparansi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Biney et al., 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan perkembangan studi *governance* di negara-negara *Global South* yang menunjukkan bahwa pembangunan berbasis infrastruktur sering kali disertai penguatan kekuasaan eksekutif dan penyederhanaan regulasi untuk mempercepat investasi strategis (Kuropyatnik, 2022; Manasseh et al., 2026). Dalam banyak kasus, percepatan pembangunan menghasilkan penyempitan ruang partisipasi publik, lemahnya pengawasan lingkungan, dan meningkatnya konflik sosial-ekologis. Dengan demikian, implementasi PSN di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai agenda pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai transformasi *governance* yang memengaruhi relasi kekuasaan antara negara, investor, dan masyarakat. Temuan mengenai *procedural participation* menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam *governance* pembangunan masih cenderung bersifat simbolik dan administratif. Walaupun forum konsultasi publik tersedia

secara formal, masyarakat tidak memiliki pengaruh substantif terhadap formulasi maupun implementasi kebijakan pembangunan. Partisipasi lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi administratif dibanding mekanisme demokrasi deliberatif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan akses informasi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas *governance* partisipatif. Keterbatasan akses terhadap dokumen lingkungan, kebijakan pembangunan, dan informasi regulatif menyebabkan masyarakat memiliki kapasitas deliberatif yang lemah. Ketimpangan informasi tersebut memperkuat relasi kekuasaan yang asimetris antara negara, investor, dan masyarakat terdampak sehingga *governance* pembangunan cenderung berlangsung secara eksklusif.

Konflik agraria yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan strategis nasional merupakan arena *constitutional contestation* antara negara dan masyarakat. Negara menggunakan pendekatan legal-formal terhadap tanah dan pembangunan, sementara masyarakat memahami tanah sebagai ruang sosial, budaya, dan identitas kolektif. Perbedaan perspektif tersebut menghasilkan konflik yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan politik, keadilan sosial, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat lokal. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa reformasi regulasi melalui kebijakan percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi memperkuat sentralisasi *governance* pembangunan nasional. Meskipun transformasi regulasi meningkatkan efisiensi pembangunan, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pengawasan demokratis dan perlindungan ekologis. Dengan demikian, *governance* pembangunan strategis tidak dapat dipahami sebagai proses yang netral secara politik, melainkan sebagai arena kekuasaan yang membentuk distribusi akses, partisipasi, dan legitimasi dalam pembangunan nasional.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa krisis legitimasi dalam *governance* pembangunan strategis tidak hanya muncul akibat konflik material mengenai tanah dan sumber daya, tetapi juga disebabkan oleh eksklusi prosedural dan ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, legitimasi *governance* harus dipahami sebagai konstruksi sosio-legal multidimensional yang dibentuk melalui transparansi kelembagaan, partisipasi substantif, perlindungan hak konstitusional, keadilan prosedural, dan akuntabilitas demokratis (Harrison & Croese, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan *governance* pembangunan strategis sangat ditentukan oleh kemampuan negara menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi dengan prinsip demokrasi konstitusional. Tanpa *governance* yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, pembangunan strategis nasional berpotensi terus menghasilkan resistensi sosial, konflik agraria, penurunan kepercayaan publik, dan krisis legitimasi dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia merefleksikan dominasi *developmentalist governance* yang menempatkan percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan sentralisasi regulasi sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, *governance* pembangunan strategis masih didominasi oleh pendekatan *executive-driven governance* yang memperkuat konsentrasi kewenangan pada pemerintah pusat dan membatasi kapasitas deliberatif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi publik dalam implementasi PSN cenderung bersifat *procedural participation* dibanding *substantive participation*. Forum konsultasi publik lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme legitimasi administratif daripada ruang demokratis yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah kebijakan pembangunan secara substantif. Kondisi tersebut diperkuat oleh ketimpangan akses informasi antara negara, investor, dan masyarakat terdampak, yang menyebabkan terjadinya *asymmetrical governance* dalam proses pembangunan strategis nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik agraria menjadi konsekuensi dominan dalam implementasi PSN. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif pengadaan tanah, tetapi juga menyangkut pengakuan hak konstitusional, perlindungan lingkungan, identitas sosial, dan keberlanjutan hidup komunitas lokal. Lemahnya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat dan pedesaan memperkuat resistensi sosial serta memperbesar kontestasi konstitusional antara negara dan masyarakat terdampak. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *legal legitimacy* dan *social legitimacy* dalam *governance* pembangunan strategis nasional. Meskipun proyek strategis memiliki legitimasi formal melalui regulasi negara, masyarakat tidak selalu memandang pembangunan sebagai proses yang adil, inklusif, dan demokratis. Oleh karena itu, legitimasi *governance* tidak hanya ditentukan oleh legalitas administratif, tetapi juga oleh kualitas partisipasi publik, transparansi *governance*, perlindungan hak konstitusional, dan keadilan prosedural.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian socio-legal dan *governance studies* melalui penjelasan mengenai hubungan antara *developmentalist governance*, *procedural participation*, dan krisis legitimasi regulasi dalam pembangunan strategis nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dalam *governance* pembangunan tidak berfungsi secara netral, melainkan menjadi instrumen politik yang membentuk relasi kekuasaan antara negara, investor, dan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi *governance* pembangunan menuju model yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Negara perlu memperkuat mekanisme deliberasi publik, memperluas akses informasi masyarakat, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional komunitas terdampak agar pembangunan strategis nasional tidak hanya memiliki *legal legitimacy*, tetapi juga memperoleh *social legitimacy* yang berkelanjutan. Tanpa reformasi *governance* yang lebih demokratis, pembangunan strategis nasional berpotensi terus menghasilkan resistensi sosial, konflik agraria, dan krisis legitimasi dalam jangka panjang.

REFERENSI

Abesha, N., Assefa, E., & Petrova, M. A. (2022). Large-Scale Agricultural Investment in Ethiopia: Development, Challenges and Policy Responses. *Land Use Policy*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106091>

- Ahn, Y. J., & Juraev, Z. (2025). Spatial Statecraft and Carbon Governance in Semi-Peripheral Uzbekistan. *Environmental Policy and Governance*. <https://doi.org/10.1002/eet.70030>
- Berman, E. M., Grin, E., Lotta, G., Abrucio, F. L., Gonzalez, L., de Souza, M. G. S., de Melo, Y. M., & dos Santos, J. G. (2025). Brazil's Public Administration and the Challenge of New Democracies: Promoting Social Inclusion. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.70045>
- Biney, N. W., Biney, W. W., Nana-Addy, E., & Ofosu-Appiah, J. F. (2025). E-permitting in Ghana: Navigating the Sub-Saharan building regulatory environment. *Urban Governance*. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.12.002>
- Chen, P., & Li, J. (2024). Sustainable Agricultural Management: How to Achieve Carbon Neutrality in Agriculture – Evidence from China Agricultural Sustainable Development Plan. *Sustainable Development*, 32(3), 2846–2857. <https://doi.org/10.1002/sd.2821>
- Choudhury, J. U. (2026). Democratic Regression in South Asia: Diverging Paths in Five Political Systems. *Round Table*. <https://doi.org/10.1080/00358533.2026.2669262>
- Constanta, C. (2024). Principle of Good Governance in Construction of the Jakarta-Bandung Fast Train Project. *Ijobsor*, 12(1), 111–119. www.ijobsor.pelnus.ac.id
- Du, X., Zhang, H., & Han, Y. (2022). How Does New Infrastructure Investment Affect Economic Growth Quality? Empirical Evidence from China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/su14063511>
- Džankić, J., Knott, E., & Pogonyi, S. (2026). Citizenship in The Global Struggles for Democracy. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2026.2631868>
- Fagbemi, F., Osinubi, T. T., & Adeosun, O. A. (2022). Enhancing Sustainable Infrastructure Development: A Boon to Poverty Reduction in Nigeria. *World Development Sustainability*, 1. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2022.100006>
- García-Llorente, C., & Olmeda, I. (2026). Algorithmic Governance in Banking: A Comparative Analysis of Risk-Based and Accountability-Oriented Oversight. *Journal of Banking Regulation*, 27(2). <https://doi.org/10.1057/s41261-026-00320-6>
- Harrison, P., & Croese, S. (2023). The Persistence and Rise of Master Planning in Urban Africa: Transnational Circuits and Local Ambitions. *Planning Perspectives*, 38(1), 25–47. <https://doi.org/10.1080/02665433.2022.2053880>
- Haruna, S. M., Ntali, A. V., Guambe, C. de A. H., Omar, M. A., & Paya, E. D. (2025). Comparative Analysis of Infrastructure Integration and Development in East and Southern Africa and Latin America. *Technium Social Sciences Journal*, 76, 153–175. <https://doi.org/10.47577/tssj.v76i1.13152>
- Hasbullah, M. F. (2026). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam Mendorong Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019–2024. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/GIJ.V2I2.4296>
- Hirschl, R., & Hudson, A. (2024). A Fair Process Matters: The Relationship between Public Participation and Constitutional Legitimacy. *Law and Social Inquiry*, 49(4), 2074–2101. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.82>
- Khanif, A., & Yunita, F. T. (2024). Food and Land Policies Amid the Agricultural Land Conversion in

- Indonesia. *Law, Environment and Development Journal*, 20(1), 58–77. <https://doi.org/10.25501/SOAS.00041290>
- Kuropyatnik, E. (2022). Financing of Large Infrastructure Projects: Chinese Experience and Russian Practice. *Review of Business and Economics Studies*, 10(2), 56–90. <https://doi.org/10.26794/2308-944X-2022-10-2-56-90>
- Kyriakopoulos, G. L., Sebos, I., Triantafyllou, E., Stamopoulos, D., & Dimas, P. (2023). Benefits and Synergies in Addressing Climate Change via the Implementation of the Common Agricultural Policy in Greece. *Applied Sciences (Switzerland)*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/app13042216>
- Lafont, C. (2025). Deliberation and Voting: An Institutional Account of the Legitimacy of Democratic Decision-Making Procedures. *Res Publica*, 31(2), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11158-023-09634-y>
- Liu, J., & Li, F. (2024). Rural revitalization driven by digital infrastructure: Mechanisms and empirical verification. *Journal of Digital Economy*, 3, 103–116. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2025.01.002>
- Maboudi, T., & Nadi, G. P. (2022). From Public Participation to Constitutional Legitimacy: Evidence from Tunisia. *Political Research Quarterly*, 75(2), 441–457. <https://doi.org/10.1177/10659129211014279>
- Manasseh, C. O., Logan, C. S., Okanya, O. C., Ejime, O. M., Ede, K. K., Onuselogu, O. C. O., Igwemeka, E. C., Nkwonta, N. C., & Akamobi, O. G. (2026). Financial Inclusion, Green Bonds, and Energy Efficiency Impact Economic Growth in Asia Under Institutional Quality Environment and Global Economic Uncertainty. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-026-02998-0>
- Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia. *Land Use Policy*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>
- Sofianto, A., Febrian, L., Ambarwati, O. C., & Risandewi, T. (2023). Mapping of Regional Strategic Issues in The Development Planning Documents (Case Study in Central Java). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1264(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1264/1/012036>
- Talitha, T. (2025). Megaprojects as a “Space Of Exception”: Unraveling Institutional and Policy Dynamics in Indonesia’s National Strategic Projects Agenda. *Environment and Planning C: Politics and Space*. <https://doi.org/10.1177/23996544251353061>
- Vampa, D., Boni, F., Fiseha, A., Kenny, M., López-Santana, M., & Zulianello, M. (2025). Emerging Issues and New Frontiers in Federalism, Regionalism and Territorial Governance: The Role of Regional & Federal Studies in Shaping Future Research Agendas. *Regional and Federal Studies*, 35(4), 493–510. <https://doi.org/10.1080/13597566.2025.2518752>
- Walecka, K. (2026). Aid Without Roots: International Support and the Hollowing Out of Party Accountability. *Policy Studies*. <https://doi.org/10.1080/01442872.2026.2635579>
- Yu, Y., Appiah, D., Zulu, B., & Adu-Poku, K. A. (2024). Integrating Rural Development, Education, and Management: Challenges and Strategies. *Sustainability (Switzerland)*, 16(15). <https://doi.org/10.3390/su16156474>
- Zenker, F., van Laar, J. A., Cepollaro, B., Găță, A., Hinton, M., King, C. G., Larson, B., Lewiński, M., Lumer, C., Oswald, S., Pichlak, M., Scott, B. D., Urbański, M., & Wagemans, J. H. M. (2024). Norms of Public Argumentation and the Ideals of Correctness and Participation. *Argumentation*,

38(1), 7–40. <https://doi.org/10.1007/s10503-023-09598-6>

Zhang, Q., Qu, Y., & Zhan, L. (2023). Great Transition and New Pattern: Agriculture and Rural Area Green Development and its Coordinated Relationship with Economic Growth in China. *Journal of Environmental Management*, 344. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118563>